

LAPORAN KINERJA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
TAHUN 2014



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN (BPPSDMP)
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) tahun 2014 harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Badan PPSDMP disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas yang diemban oleh Badan PPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaan tugasnya, Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (4) pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan.

Periode 2010-2014, Badan PPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu terwujudnya SDM pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan PPSDMP menetapkan 4 (empat) misi yaitu: (a) Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu; (b) Memantapkan sistem pelatihan

pertanian yang berbasis kompetensi; (c) Merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel; (d) Memantapkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel. Program yang diemban adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Sejalan dengan visi dan misi, serta untuk mendukung 4 sukses sasaran strategis Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2014, Badan PPSDMP menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2014, yaitu: (1) Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian; (2) Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian; (3) Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian; (4) Meningkatnya kompetensi tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda; (5) Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani; dan (6) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian.

Berdasarkan 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan, nilai rata-rata capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2014 menunjukkan bahwa (1) aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya sebanyak 108,06% sedangkan non aparatur yang meningkat kompetensinya sebanyak 107,15%; (2) penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya sebanyak 99,00 %; (3) aparatur fungsional pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi pertanian yang meningkat kompetensinya sebanyak 98,26%; (4) peserta didik menengah pertanian dan calon wirausahawan muda yang meningkat kompetensinya sebesar 102,33%; (5) kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya sebesar 96,91%; (6) kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar 96,27%

Pagu Anggaran Tahun 2014 yang tertuang di Penetapan Kinerja sebesar Rp1.098.836.025.000,00. Pagu tersebut menindaklanjuti dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Pagu awal Badan PPSDMP pada awal tahun anggaran 2014 adalah Rp1.149.818.700.000,00.

Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2014 setelah mendapat alokasi APBN-P terkait kegiatan READ menjadi Rp1.114.979.737.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2014, realisasi serapan anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2014 pada tahun 2014, secara menyeluruh mencapai **95,52%** yaitu sebesar Rp1.065.052.207.670,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp1.114.979.737.000,00.

KATA PENGANTAR

Tugas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundangan, dengan fungsi-fungsi: (a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundangan; dan (d) pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan Pertanian; (3) Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; serta (4) Sekretariat Badan PPSDMP. Pada pelaksanaan di lapangan, Badan PPSDMP didukung oleh 78 Satker terdiri atas: 1 Satker di Pusat, 20 Satker UPT Pusat, 34 Satker Dekonsentrasi dan 5 Satker Tugas Pembantuan.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2014, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan PPSDMP selama tahun 2014. Guna meningkatkan akuntabilitas, laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2015

Kepala Badan,



Dr. Ir. Winny Dron Wibawa, M.Sc.
NIP. 19590329198403 1002

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Organisasi dan Tata Kerja	2
D. Lingkungan Strategis Organisasi	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahunan	14
C. Penetapan Kinerja	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Badan PPSDMP	25
1. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian	27
2. Meningkatkan Kinerja Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	32
3. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian melalui Pendidikan Tinggi Pertanian.....	35
4. Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik Menengah Pertanian dan Calon Wirausahawan Muda	37
5. Meningkatkan Kemandirian (Kapasitas) Kelembagaan Petani	39
6. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian	41
B. Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV. PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sasaran, dan Indikator Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2011 s.d 2014	10
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2014	14
Tabel 3. Penetapan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2014	17
Tabel 4. Kegiatan pada Indikator Kinerja Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur di Sektor Pertanian	19
Tabel 5. Kegiatan pada Indikator Kinerja Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	20
Tabel 6. Kegiatan pada Indikator Kinerja Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian	21
Tabel 7. Kegiatan pada Indikator Kinerja (Kompetensi) Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan Calon Wirausahaan Muda ..	22
Tabel 8. Kegiatan pada Indikator Kinerja Kemandirian (Kapasitas) Kelembagaan Petani	23
Tabel 9. Kegiatan pada Indikator Kinerja Kemandirian (Kapasitas) Kelembagaan Petani	24
Tabel 10. Hasil Pengukuran Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2014	26
Tabel 11. Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi Aparatur Tahun 2010 – 2014	31
Tabel 12. Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi Non Aparatur Tahun 2011 – 2014	32
Tabel 13. Capaian Kinerja Peningkatan Kinerja Ketenagaan Penyuluhan Tahun 2010 – 2014	34
Tabel 14. Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian Melalui Pendidikan Tinggi Pertanian Tahun 2010 – 2014	37
Tabel 15. Capaian Kinerja Peningkatan Ketersediaan Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan Calon Wirausahawan Muda Tahun 2010 – 2014	39
Tabel 16. Capaian Kinerja Peningkatan Kemandirian (Kapasitas) Kelembagaan Petani Tahun 2011 – 2014	41
Tabel 17. Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Bidang SDM Pertanian Tahun 2010 – 2014	45
Tabel 18. Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2010 – 2014	48

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Penyelenggaraan Pelatihan bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian	30
Gambar 2.	Penyuluh Pertanian dalam Mendampingi Petani/Kelompok Tani	33
Gambar 3.	Aktifitas Proses pembelajaran Aparatur Fungsional di STPP	36
Gambar 4.	Wisuda Nasional STPP	36
Gambar 5.	Proses Pembelajaran Bagi Siswa SMK-PP	38
Gambar 6.	Kelembagaan Petani Gapoktan dan P4S	40
Gambar 7.	Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi SL-PTT	40
Gambar 8.	Kunjungan Kepala Badan PPSDMP ke BP3K Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.....	42
Gambar 9.	Kegiatan Penyuluhan Pertanian di BP3K	43
Gambar 10.	Kelembagaan pelatihan Pertanian (BBPP Lembang dan BPP Lampung).....	43
Gambar 11.	Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Menengah Pertanian (STPP Magelang dan SMK-PP Banjarbaru).....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) tahun 2014 harus dapat dipertanggungjawabkan dan dicapai secara efektif, efisien dan transparan, khususnya kepada atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan PPSDMP, maka Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Badan PPSDMP selama tahun 2014, Laporan Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) Tahun 2014.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 61/ Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Badan PPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian; dan
4. Sekretariat Badan PPSDMP.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Badan PPSDMP diuraikan sebagai berikut:

a. Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 3) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani.

Organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas 3 (tiga) bidang, 6 (enam) subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a) Bidang Program dan Informasi, meliputi:
 - (1) Subbidang Program dan Kerjasama;
 - (2) Subbidang Informasi dan Materi.

- b) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan, meliputi:
 - (1) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - (2) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan.
- c) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani, meliputi :
 - (1) Subbidang Kelembagaan Petani;
 - (2) Subbidang Usahatani.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- 3) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas 3 (tiga) bidang, 6 (enam) subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a) Bidang Program dan Kerjasama, meliputi:
 - (1) Subbidang Program;
 - (2) Subbidang Kerjasama.
- b) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan, meliputi:
 - (1) Subbidang Kelembagaan Pelatihan;
 - (2) Subbidang Ketenagaan Pelatihan.
- c) Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, meliputi:
 - (1) Subbidang Sistem dan Metode;
 - (2) Subbidang Evaluasi Penyelenggaraan.

c. **Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, Rencana dan Program, Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
- 2) Pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian;
- 3) Pelaksanaan penyusunan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian terdiri atas 3 (tiga) bidang, 6 (enam) subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a) Bidang Program dan Kerjasama, meliputi:
 - (1) Subbidang Program;
 - (2) Subbidang Kerjasama.
- b) Bidang Pendidikan, meliputi:
 - (1) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - (2) Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan.
- c) Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, meliputi:
 - (1) Subbidang Standardisasi Kompetensi;
 - (2) Subbidang Sertifikasi Profesi.

d. **Sekretariat Badan PPSDMP** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Pada pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

- 3) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
- 4) Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Badan PPSDMP.

Struktur organisasi Sekretariat Badan PPSDMP terdiri atas 4 Bagian, 12 Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

- a) Bagian Perencanaan, meliputi:
 - (1) Subbagian Program dan Kerjasama;
 - (2) Subbagian Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian;
 - (3) Subbagian Anggaran.
- b) Bagian Keuangan dan Perlengkapan, meliputi:
 - (1) Subbagian Perbendaharaan;
 - (2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;
 - (3) Subbagian Perlengkapan.
- c) Bagian Umum, meliputi:
 - (1) Subbagian Hukum dan Organisasi;
 - (2) Subbagian Kepegawaian;
 - (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- d) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, meliputi subbagian:
 - (1) Subbagian Evaluasi;
 - (2) Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - (3) Subbagian Hubungan Masyarakat.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi Badan PPSDMP terdiri atas lingkungan strategis internal dan eksternal. Lingkungan strategis internal yang menjadi kekuatan (*strength*) Badan PPSDMP dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian tahun 2014 meliputi:

1. Tingkat Pusat didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP. Pelaksanaan di lapangan didukung oleh 20 Satuan Kerja (Satker) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 34 Satker Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 5 Satker Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan) di Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah yang melaksanakan Program Pemberdayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian (*READ Programme*);
2. Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan PPSDMP didukung oleh 2.275 orang aparat, yang terdiri atas aparat yang bertugas di pusat sebanyak 386 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 1.889 orang. Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan terdiri atas: golongan I sebanyak 133 orang; golongan II sebanyak 596 orang; golongan III sebanyak 1.219 orang, dan golongan IV sebanyak 317 orang. Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas: S3 (Doktor) sebanyak 56 orang, S2 (magister) sebanyak 475 orang, S1/D4 (sarjana/diploma) sebanyak 805 orang, Diploma (D1-D3) sebanyak 91 orang, SLTA sebanyak 624 orang, SLTP sebanyak 91 orang dan SD sebanyak 140 orang. Badan PPSDMP juga didukung oleh sarana prasarana dan anggaran yang cukup memadai.

Sedangkan lingkungan internal organisasi yang merupakan kelemahan (*weaknesses*) dan masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian hingga saat ini meliputi:

- a. Tenaga penyuluh, dosen, guru, dan widyaiswara belum mencukupi;
- b. Penyuluh dan guru belum seluruhnya memperoleh sertifikat profesi;
- c. Penyebaran widyaiswara, guru dan dosen belum meratanya;
- d. Kelembagaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang terstandarisasi;
- e. Sistem penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan belum dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang memenuhi mutu pelayanan publik;

- f. Kesempatan pengembangan kemampuan bagi petugas masih terbatas dan belum meratanya;
- g. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait belum optimal.

Lingkungan strategis eksternal organisasi yang merupakan peluang (*opportunities*) dalam pengembangan SDM pertanian sebagai berikut:

- a. Keberadaan UPT Pusat yang menjalankan fungsi pendidikan yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) sebanyak 6 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) sebanyak 3 unit;
- b. Keberadaan UPT Pusat yang menjalankan fungsi pelatihan yaitu Pusat Pelatihan Manajemen, Balai Besar Pelatihan sebanyak 7 unit, Balai Pelatihan sebanyak 2 unit;
- c. Keberadaan lembaga penyuluhan di 34 provinsi terdiri dari 22 unit Badan/Sekretariat Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh), 10 unit Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP), dan 2 unit Dinas. Selain lembaga penyuluhan di tingkat provinsi, terdapat lembaga penyuluhan di 511 kabupaten/kota yang terdiri dari 152 unit Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh), 184 unit Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) dan 175 unit Dinas. Di tingkat kecamatan terdapat lembaga penyuluhan sebanyak 5.232 unit Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K);
- d. Badan PPSDMP juga didukung oleh lembaga pelatihan pertanian di daerah milik petani seperti Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebanyak 963 unit, Kelompok Tani (Poktan) sebanyak 322.390 Poktan, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebanyak 37.632 gapoktan, Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi Tani dan Badan Usaha Milik Desa) sebanyak 10.065 Koptan/BUMP, Pos Penyuluhan Desa sebanyak 6.596 unit dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3 model) sebanyak 125 unit yang merupakan binaan Badan PPSDMP;
- e. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah meliputi Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 27.476 orang, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian sebanyak 20.479 orang, Penyuluh Pertanian Honorer sebanyak 1.251 orang dan Penyuluh Swadaya sebanyak 13.169 orang;

- f. Dukungan (*sharing*) pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;
- g. Peningkatan kemampuan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian;
- h. Dukungan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian melalui program *Rural Empowerment and Agricultural Development Program* (READ) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Lingkungan strategis eksternal organisasi yang menjadi tantangan (*threats*) yang masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan pengembangan SDM pertanian meliputi:

- a. Mayoritas sumber daya manusia pertanian (petani) memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah;
- b. Berkurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian;
- c. Lemahnya aksesibilitas petani terhadap lembaga permodalan, lembaga penyedia sarana produksi, lembaga pemasaran dan sumber informasi/teknologi;
- d. Kemiskinan, pengangguran dan penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2010-2014 (revisi) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Badan PPSDMP yang disesuaikan dengan perubahan organisasi di tingkat Kementerian Pertanian.

1. Visi

Visi Badan PPSDMP tahun 2010-2014 adalah terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi organisasi, Badan PPSDMP menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

- a. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu;
- b. Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi;
- c. Merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel;
- d. Memantapkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2010-2014 adalah:

- a. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani;
- b. Meningkatkan kompetensi kerja aparatur pertanian dan kompetensi non-aparatur pertanian;

- c. Menghasilkan aparatur dan non aparatur pertanian yang kompeten dan tersertifikasi;
- d. Meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.

4. Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan PPSDMP dalam berdasarkan Tabel Lampiran Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah **meningkatnya kemampuan, kompetensi, kemandirian, dan daya saing SDM pertanian melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian.**

Rincian sasaran strategis dan indikator kinerja *outcome* Badan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Sasaran, dan Indikator Kinerja Badan PPSDMP
Tahun 2011 s.d 2014

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
Meningkatnya kemampuan, kompetensi, kemandirian, dan daya saing SDM pertanian melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian	1. Meningkatnya kompetensi aparatur di sektor pertanian (orang)	18.138	24.443	26.327	29.312
	2. Meningkatnya kapasitas non aparatur di sektor pertanian (orang)	19.080	22.205	22.205	24.014
	3. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan (orang)	36.000	55.458	55.458	72.000
	4. Meningkatnya kapasitas aparatur fungsional pertanian (orang)	1.050	4.429	4.429	5.029
	5. Tersedianya tenaga teknis menengah dan	10.000	16.248	16.248	16.248

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
	calon wirausahawan muda di sektor pertanian (orang)				
	6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani (unit)	38.474	51.763	51.704	72.170
	7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah (unit)	512	2.088	2.088	2.088

*¹Berdasarkan Dokumen Renstra Badan PPSDMP 2010 – 2014 (edisi revisi)

5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM yang ditetapkan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi meliputi:

- Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat;
- Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan;
- Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian;
- Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri;
- Pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten;
- Meningkatkan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian;

- g. Mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten;
- h. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Mengacu pada kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi sebagai berikut:

- a. Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat;
- b. Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian sertaantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan;
- c. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian PNS, swadaya dan swasta;
- d. Penataan dan pengembangan usahatani yang mandiri dan berdaya saing;
- e. Penataan serta peningkatan kompetensi THL-TB Penyuluh Pertanian;
- f. Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel;
- g. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian;
- h. Peningkatan jumlah dan mutu sarana prasarana kelembagaan pelatihan pertanian;
- i. Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani (P4S);
- j. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian;
- k. Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian;
- l. Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian;
- m. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian;
- n. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian;

- o. Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian;
- p. Pemantapan sistem perencanaan;
- q. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
- r. Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

6. Program dan Kegiatan

Program berbasis kinerja yang diemban oleh Badan PPSDMP periode 2010-2014 adalah **Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani**. Mengacu pada program tersebut, maka kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2014 meliputi kegiatan:

- a. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian, meliputi:
 - (1) Pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian;
 - (2) Pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - (3) Pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani.
- b. Pemantapan sistem pelatihan pertanian, meliputi kegiatan:
 - (1) Pemantapan kelembagaan pelatihan pertanian;
 - (2) Peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian;
 - (3) Peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
 - (4) Pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian;
 - (5) Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian perdesaan dikembangkan melalui *Rural Empowerment and Agricultural Development Program* (Program READ).
- c. Revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, terdiri atas:
 - (1) Pengembangan Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, meliputi: peningkatan kualitas pendidikan pertanian; pengembangan program dan kerjasama pendidikan pertanian; serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi;
 - (2) Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian, meliputi: Kegiatan pengembangan pendidikan menengah pertanian meliputi: penyelenggaraan pendidikan pertanian; pengembangan program dan

kerjasama pendidikan pertanian; serta pengembangan kelembagaan dan ketenagaan.

- d. Dukungan administrasi manajemen dan teknis lainnya, meliputi: pemantapan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan; pemantapan sistem perencanaan; pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; serta pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan PPSDMP tahun 2014 merupakan bagian dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Dokumen RKT ini memuat program dan kegiatan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan oleh Badan PPSDMP pada tahun 2014.

Mengacu pada Renstra Badan PPSDMP tahun 2010-2014, Program yang diemban oleh Badan PPSDMP Tahun 2014 adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Sasaran strategis Badan PPSDMP yang tertuang dalam RKT tahun 2014 adalah meningkatkan kemampuan, kompetensi, kemandirian, dan daya saing SDM pertanian melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian. Secara rinci, program, sasaran strategis, indikator kinerja dan target Badan PPSDMP tahun 2014 tertuang dalam RKT Badan PPSDMP Tahun 2014. Sasaran dan indikator dalam RKT Badan PPSDMP Tahun 2014, telah disusun selaras dengan Renstra dan IKU Badan PPSDMP dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Rencana Kinerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2014

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	1. Aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan pertanian (orang)	28.035
	2. Non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang)	24.014
	3. Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (unit)	29
	4. Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan	1.277

Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	dikembangkan (orang)	
	5. Desa yang meningkat kapasitasnya melalui program READ (unit)	150
	6. Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi (unit)	170
	7. Norma, standar, pedoman dan kebijakan yang dihasilkan (dokumen)	94
	8. Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan pelatihan yang dihasilkan (dokumen)	132
	9. Dukungan pemantapan sistem pelatihan pertanian (bulan)	12
Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	1. Aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan formal pasca sarjana (orang)	204
	2. Aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi kedinasan pertanian (orang)	2.825
	3. Kelembagaan pendidikan pertanian, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (unit)	6
	4. Ketenagaan pendidikan pertanian, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang ditingkatkan dan dikembangkan (orang) kedinasan yang ditingkatkan kualitasnya (orang)	3.180
	5. Profesi bidang pertanian yang distandarisasi (dokumen)	7
	6. SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi (orang)	2.000
	7. Dukungan revitalisasi pendidikan pertanian serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian (bulan)	12
	8. Dokumen perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan revitalisasi pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi profesi pertanian	107
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (unit)	2.044
	2. Kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan (unit)	72.000
	3. Ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi (orang)	72.000
	4. Materi penyuluhan yang dihasilkan (judul)	4.369

Progam dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	5. Norma, standar, pedoman, dan kebijakan yang dihasilkan dan dikembangkan FEATI (dokumen)	247
	6. Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT (WKPP)	13.800
	7. Dukungan pemantapan sistem penyuluhan pertanian (bulan)	12
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1. Perencanaan, perundang-undangan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, evaluasi, pelaporan, kehumasan dan perpustakaan (dokumen)	91
	2. Dukungan manajemen dan teknis lainnya (bulan)	12
Pendidikan Menengah Petanian	1. Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian (orang)	16.248
	2. Kelembagaan SMK SPP yang difasilitasi dan dikembangkan (unit)	9
	3. Ketenagaan SMK SPP yang difasilitasi dan dikembangkan (orang)	241
	4. Dokumen perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan menengah (dokumen)	59
	5. Dukungan pendidikan menengah pertanian (bulan)	12

*¹Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan Badan PPSDMP Tahun 2014

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Badan PPSDMP telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 49//Permentan/OT.140/8/2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014. Indikator Kinerja tersebut dimanfaatkan oleh Badan PPSDMP dalam proses perencanaan yaitu dalam proses Penyusunan Anggaran dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Menteri Pertanian dan Kepala Badan PPSDMP untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja ini

dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk: (a) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; (b) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja; dan (c) Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja yang disusun sesuai Indikator Kinerja Utama merupakan tindak lanjut Rencana Kinerja Tahunan yang telah mendapatkan anggaran dalam DIPA tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Badan PPSDMP (sebagai pihak pertama) dan Menteri Pertanian (sebagai pihak kedua). Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Badan PPSDMP menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian;
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian;
4. Meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian dan calon wirausahawan muda;
5. Meningkatnya kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani;
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian

Untuk mencapai 6 (enam) sasaran strategis, telah ditetapkan target dalam Penetapan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2014 yang disusun selaras dengan Renstra Badan PPSDMP Tahun 2010 - 2014, IKU Badan PPSDMP 2010 - 2014, dan RKT Badan PPSDMP Tahun 2014. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 pada Lampiran 1. Penetapan Kinerja Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Penetapan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2014

Sasaran strategis	Indikator	Target (Inpres No.4 Tahun 2014)
1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	Kompetensi aparatur di sektor pertanian	9.599 orang
	Kompetensi non aparatur di sektor pertanian	3.791 orang
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian	Kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian	51.353 orang

Sasaran strategis	Indikator	Target (Inpres No.4 Tahun 2014)
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian	Kompetensi aparatur fungsional pertanian	2.651 orang
4. Meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian dan calon wirausahawan muda	(Kompetensi) Tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda pertanian	18.077 orang
5. Meningkatnya kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani	Kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani	20.386 unit
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian	Kualitas (kapasitas) kelembagaan pemerintah di bidang SDM Pertanian	2.227 unit

^{a)}Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2014

Jumlah Anggaran Badan PPSDMP dibawah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.098.836.025.000,00.

1. Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian

Pencapaian sasaran meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian dilaksanakan oleh kegiatan utama Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. Kegiatan pendukung dalam pencapaian target tersebut terdiri atas:

- Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis pertanian dan manajemen kepemimpinan pertanian dan fungsional bagi aparatur pertanian;
- Diklat teknis pertanian dan manajemen bagi non aparatur pertanian.

Rincian kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4.
Kegiatan pada Indikator Kinerja
Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur di Sektor Pertanian

Indikator Kinerja	Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan
Kompetensi aparatur di sektor pertanian sejumlah 9.599 orang	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis pertanian dan manajemen kepemimpinan pertanian dan fungsional bagi aparatur pertanian sebanyak 9.599 orang
Kompetensi non aparatur di sektor pertanian sejumlah 3.791 orang	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Diklat teknis pertanian dan manajemen bagi non aparatur pertanian sebanyak 3.791 orang

2. Meningkatnya Kinerja Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Pencapaian sasaran meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh kegiatan utama Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Kegiatan pendukung dalam pencapaian target tersebut terdiri atas:

- a. Fasilitasi bagi ketenagaan penyuluhan Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian;
- b. Pembinaan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Rincian kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Kegiatan pada Indikator Kinerja Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Indikator Kinerja	Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan
Kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian sejumlah 51.353 orang	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi bagi ketenagaan penyuluhan (BOP bagi Penyuluh Pertanian PNS serta Honor dan BOP bagi THL-TB PP) sebanyak 50.248 orang
		Pembinaan ketenagaan penyuluhan pertanian sebanyak 1.105 orang

3. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian Melalui Pendidikan Tinggi Pertanian

Pencapaian sasaran meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian dilaksanakan oleh kegiatan utama Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian (*Pengembangan Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian*). Kegiatan pendukung dalam pencapaian target tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan kedinasan (Diploma IV) di STPP.

Rincian kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6.
Kegiatan pada Indikator Kinerja
Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian

Indikator Kinerja	Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan
Kompetensi aparatur fungsional pertanian sejumlah 2.651 orang	Revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian (Pengembangan Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian)	Pendidikan kedinasan (Diploma IV) di STPP bagi 2.651 orang

4. Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik Menengah Pertanian Dan Calon Wirausahawan Muda

Pencapaian sasaran meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian dan calon wirausahawan muda dilaksanakan oleh kegiatan utama Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian (*Pengembangan Pendidikan Menengah*). Kegiatan pendukung dalam pencapaian target tersebut adalah:

- a. Penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian SMK-PP;
- b. Fasilitasi Bantuan Praktek Siswa;
- c. Fasilitasi pertukaran siswa SMK-PP ke luar negeri;
- d. Pengembangan karya inovatif.

Rincian kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian dan calon wirausahawan muda disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7.
Kegiatan pada Indikator Kinerja
(Kompetensi) Tenaga Teknis Menengah Pertanian
dan Calon Wirausaha Muda

Indikator Kinerja	Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan
(Kompetensi) Tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda pertanian sejumlah 18.077 orang	Revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian (Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian)	Penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian bagi 2.925 siswa SMK-PP.
		Fasilitasi Bantuan Praktek Siswa bagi 15.132 orang
		Fasilitasi pertukaran siswa SMK-PP ke luar negeri sebanyak 10 orang
		Pengembangan karya inovatif bagi 10 orang siswa SMK-PP

5. Meningkatnya Kemandirian (Kapasitas) Kelembagaan Petani

Pencapaian sasaran meningkatnya kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani dilaksanakan oleh kegiatan utama Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian . Kegiatan pendukung dalam pencapaian target tersebut adalah:

- a. Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani;
- b. Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT ;
- c. Pembinaan dan klasifikasi Kelembagaan pelatihan milik petani (P4S).

Rincian kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran meningkatnya kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8.
Kegiatan Pada Indikator Kinerja
Kemandirian (Kapasitas) Kelembagaan Petani

Indikator Kinerja	Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan
Kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani sejumlah 20.386 unit	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani sebanyak 6.452 unit
	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT sebanyak 13.635 unit
	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Pembinaan dan klasifikasi kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) sebanyak 299 unit

6. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian

Pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM Pertanian dilaksanakan oleh kegiatan utama Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian dan Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian. Kegiatan pendukung dalam pencapaian target tersebut adalah:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan tinggi, standardisasi dan sertifikasi profesi;
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan menengah pertanian.

Rincian kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM Pertanian disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9.
Kegiatan Pada Indikator Kinerja
Kemandirian (Kapasitas) Kelembagaan Petani

Indikator Kinerja	Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan
Kualitas (kapasitas) kelembagaan pemerintah di bidang SDM Pertanian sejumlah 2.227 unit	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan sebanyak 1.577 unit dengan rincian kelembagaan penyuluhan provinsi: 33 unit, kabupaten/kota :497 unit, kecamatan: 1.047 unit
	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan sebanyak 25 unit
	Revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan tinggi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian sebanyak 183 unit
		Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan menengah pertanian sebanyak 442 unit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan PPSDMP

Badan PPSDMP sebagai salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung 4 (empat) sukses sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2014, melalui Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2014. Pengukuran kinerja merupakan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja dalam Penetapan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2014. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan pencapaian *outcome* yang merupakan berfungsinya *output* penting yang telah dilaksanakan oleh unit kerja Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pelatihan Pertanian, dan Pusat Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian.

Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran dimonitor oleh secara berjenjang oleh Badan PPSDMP selama Tahun 2014. Secara umum capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2014 berkisar antar 96,27% sampai dengan 108,06%, dengan rata-rata 101,14%. Capaian kinerja tertinggi dicapai oleh sasaran strategis meningkatnya kompetensi aparatur pertanian, sedangkan capaian terendah dicapai oleh sasaran strategis meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian.

Hasil pengukuran kinerja Badan PPSDMP tahun 2014 pada masing-masing sasaran strategis disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10.
Hasil Pengukuran Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	1.Kompetensi aparatur di sektor pertanian (orang)	9.599	10.373	108,06
	2.Kompetensi non aparatur di sektor pertanian (orang)	3.791	4.062	107,15
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian	Kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian (orang)	51.353	50.841	99,00
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian	Kompetensi aparatur fungsional pertanian (orang)	2.651	2.605	98,26
4. Meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian dan calon wirausahawan muda	(Kompetensi) Tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda pertanian (orang)	18.077	18.499	102,33
5. Meningkatnya kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani	Kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani (unit)	20.386	19.756	96,91
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian	Kualitas (kapasitas) kelembagaan pemerintah di bidang SDM Pertanian (unit)	2.227	2.144	96,27
Rata-rata				101,14

Keterangan: sumber data realisasi dari Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian, serta Pusat Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian.

1. Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian

Berdasarkan Tabel 10, menunjukkan aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya sebanyak **108,06%** (dari target 9.599 orang aparatur sektor pertanian, terealisasi 10.373 orang), sedangkan non aparatur yang meningkat kompetensinya sebanyak **107,15%** (dari target 3.791 orang non aparatur pertanian, terealisasi sebanyak 4.062 orang). Meningkatnya kompetensi aparatur dicapai melalui pelaksanaan diklat.

Diklat aparatur ditujukan untuk meningkatkan kompetensi kerja dalam upaya pengembangan karir PNS dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur. Jenis kegiatan diklat aparatur sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan yang terdiri dari:

- 1) Diklat kepemimpinan;
- 2) Diklat administrasi dan manajemen;
- 3) Diklat fungsional rumpun ilmu hayat pertanian.

b. Diklat teknis pertanian yang terdiri dari:

- 1) Diklat teknis agribisnis padi;
- 2) Diklat teknis agribisnis jagung;
- 3) Diklat teknis agribisnis kedelai;
- 4) Diklat teknis agribisnis tebu;
- 5) Diklat teknis peternakan sapi potong;
- 6) Diklat teknis agribisnis cabe merah dan bawang merah;
- 7) Diklat diversifikasi pangan;
- 8) Diklat teknis mendukung nilai tambah dan daya saing;
- 9) Diklat teknis agribisnis perkebunan lainnya;
- 10) Diklat teknis agribisnis hortikultura lainnya;
- 11) Diklat teknis agribisnis peternakan lainnya;
- 12) Diklat tanaman pangan lainnya;
- 13) Diklat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 14) Diklat metodologi penyuluhan pertanian.

Diklat pertanian bagi non aparatur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur. Pelatihan Non Aparatur dimaksudkan untuk pengembangan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang bergerak di bidang agribisnis yang terdiri dari 4 jenis pelatihan yaitu:

- a. Pelatihan kewirausahaan;
- b. *Agri training camp*;
- c. Diklat kesejahteraan petani
- d. Diklat teknis (diklat teknis agribisnis padi; diklat teknis agribisnis jagung. Diklat teknis agribisnis kedelai; diklat teknis agribisnis tebu; diklat teknis agribisnis cabe merah dan bawang merah; diklat teknis mendukung nilai tambah dan daya saing pertanian; diklat teknis perkebunan lainnya; diklat teknis agribisnis hortikultura lainnya; diklat teknis agribisnis peternakan lainnya; diklat tanaman pangan lainnya; dan diklat metodologi).

Pelaksanaan diklat tersebut diatas diselenggarakan di 10 UPT Pelatihan yaitu:

- 1) PPMKP Ciawi;
- 2) BBPKH Cinagara;
- 3) BBPP Lembang;
- 4) BBPP Batu;
- 5) BBPP Ketindan;
- 6) BBPP Binuang;
- 7) BBPP Kupang;
- 8) BBPP Batangkaluku;
- 9) BPP Jambi;
- 10) BPP Lampung.

Dan terdapat 18 UPT Pelatihan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saree Aceh (NAD);
- 2) BDPLP Sumut;
- 3) BDPTPH Sumbar;

- 4) BDTP Riau;
- 5) BPPSDMP Sumsel;
- 6) Bapeltan Jabar;
- 7) BPSDP Soropadan-Jateng;
- 8) BPPSDMP Ungaran-Jateng;
- 9) BPPSDMP Wonocatur-DIY;
- 10) BDP Nganjuk-Jatim;
- 11) BKPP Anjungan-Kalbar;
- 12) BPTP Sempaja-Kaltim;
- 13) BDP Kalasey- Sulut;
- 14) BPTP Sidera-Sulteng;
- 15) BDP Kendari-Sultra;
- 16) BDP Mataram-NTB;
- 17) BDP Ambon-Maluku;
- 18) BDP Sentani-Papua. Selain itu pelaksanaan diselenggarakan di eks - UPT Pelatihan.

Mekanisme, metode pelaksanaan pelatihan, sasaran dan persyaratan peserta, dan waktu pelaksanaan telah diatur dalam peraturan yang berlaku yang dijelaskan lebih lanjut melalui petunjuk teknis. Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan UPT dalam mengevaluasi peningkatan kompetensi dilakukan pada awal pelaksanaan diklat (*Pre Test*), dan pada akhir pelaksanaan diklat (*Post Test*).



Gambar 1. Penyelenggaraan Pelatihan bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian

Hal-hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah:

- a. Kebutuhan diklat didasarkan pada hasil koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian melalui implementasi *e-proposal*, rapat koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan UPT Pelatihan;

- b. Kebutuhan diklat juga didasarkan pada Nota Kesepahaman lintas sektor dalam penyelenggaraan diklat;
- c. Penyelenggaraan diklat selain melibatkan Widyaiswara sebagai fasilitator, juga para dosen dan praktisi;
- d. Peningkatan penyelenggaraan diklat juga diarahkan dengan pemanfaatan Informasi Teknologi dan adanya *quality control* terhadap hasil diklat.

Hal-hal yang menghambat pada pencapaian kinerja tersebut adalah:

- a. Belum meratanya kualitas dan kompetensi widyaiswara;
- b. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL) dan Analisa Kebutuhan Latihan (AKL) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta latihan;
- c. Kurikulum pelatihan belum sepenuhnya sesuai dan serasi dengan jenis pelatihan;
- d. Seleksi peserta kurang ketat dan cermat, kualifikasi tidak sesuai yang ditentukan/diharapkan.

Capaian kinerja peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur apabila dibandingkan dari tahun 2010 - 2014 disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12.

Tabel 11.
Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi Aparatur
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
2010	16.835	13.131	77,99
2011	17.370	23.875	137,45
2012	18.363	17.925	97,61
2013	19.043	17.168	90,15
2014	9.599	10.373	108,06

Tabel 12.
Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi Non Aparatur
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
2010	10.000	9.350	93,50
2011	18.668	16.988	91,00
2012	8.830	8.477	96,00
2013	8.035	7.616	94,51
2014	3.791	4.062	107,15

Pada Tabel 12 menunjukkan bahwa capaian aparatur dan non aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya pada tahun 2010 dan 2014 mencapai lebih dari 100,00%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi alokasi anggaran yang direalokasikan untuk penambahan peserta pelatihan.

2. Meningkatnya Kinerja Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan Tabel 10, menunjukkan ketenagaan penyuluhan pertanian yang meningkat kinerjanya sebanyak **99,00%** (dari target 51.353 orang aparatur sektor pertanian, teralisasi 50.841 orang). Meningkatkan kinerja ketenagaan penyuluh pertanian dapat terwujud melalui peningkatan kinerja Penyuluh Pertanian PNS; peningkatan Kinerja THL-TB Penyuluh Pertanian; penumbuhan dan peningkatan peran penyuluh swadaya pembinaan, dan peningkatan kapasitas Penyuluh PNS dan THL-TBPP; dan pemberian penghargaan bagi penyuluh dan kepala balai.

Kinerja ketenagaan penyuluhan diukur melalui kinerja penyuluh dalam melakukan pendampingan petani di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Dalam mendukung kinerja penyuluh pertanian, Kementerian Pertanian khususnya Badan PPSDMP memberikan fasilitasi dalam bentuk honor dan Biaya Operasional Penyuluhan (BOP). Honor dan BOP diberikan kepada penyuluh berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten dan provinsi.



Gambar 2. Penyuluh Pertanian dalam Mendampingi Petani/
Kelompok Tani

Honor THL-TB Penyuluh Pertanian, Honor bagi THL-TB Penyuluh Pertanian disesuaikan dengan jenjang pendidikan yaitu S1/D4 sebesar Rp1.700.000,00/bulan, D3 sebesar Rp1.200.000,00/bulan, dan SLTA Rp800.000,00/bulan. BOP dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional penyuluh PNS dan THL-TB Penyuluhan Pertanian untuk melakukan kunjungan/pembinaan penyuluhan di wilayah binaannya masing-masing. Besaran BOP setiap bulan dibedakan dalam 3 wilayah yaitu, wilayah barat

sebesar Rp320.000,00, wilayah tengah sebesar Rp400.000,00, dan wilayah timur sebesar Rp480.000,00.

Hal-hal yang mendukung pencapaian kinerja adalah:

- Pelatihan bagi penyuluh baik pelatihan teknis maupun fungsional;
- Keikutsertaan penyuluh dalam sertifikasi penyuluh;
- Ketertiban penyuluh dalam menyampaikan laporan rutin.

Hal yang menghambat pencapaian kinerja tersebut adalah

- Up dating* data penyuluh baik yang mutasi maupun meninggal tidak tertib;
- Penetapan jumlah penyuluh yang menerima BOP terlambat (kabupaten/kota tidak tertib mengirimkan usulan tenaga penyuluh yang menerima BOP);
- Tidak tertibnya penyuluh dalam menyampaikan laporan bulanan;
- Tidak tercapainya target karena adanya penyuluh pertanian PNS pensiun, meninggal, tugas belajar, pindah ke struktural, THL-TB PP yang mengundurkan diri, meninggal, dan pindah kerja.

Capaian kinerja meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian apabila dibandingkan dari tahun 2010 – 2014 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13.
Capaian Kinerja Peningkatan Kinerja Ketenagaan Penyuluhan
Tahun 2010 - 2014

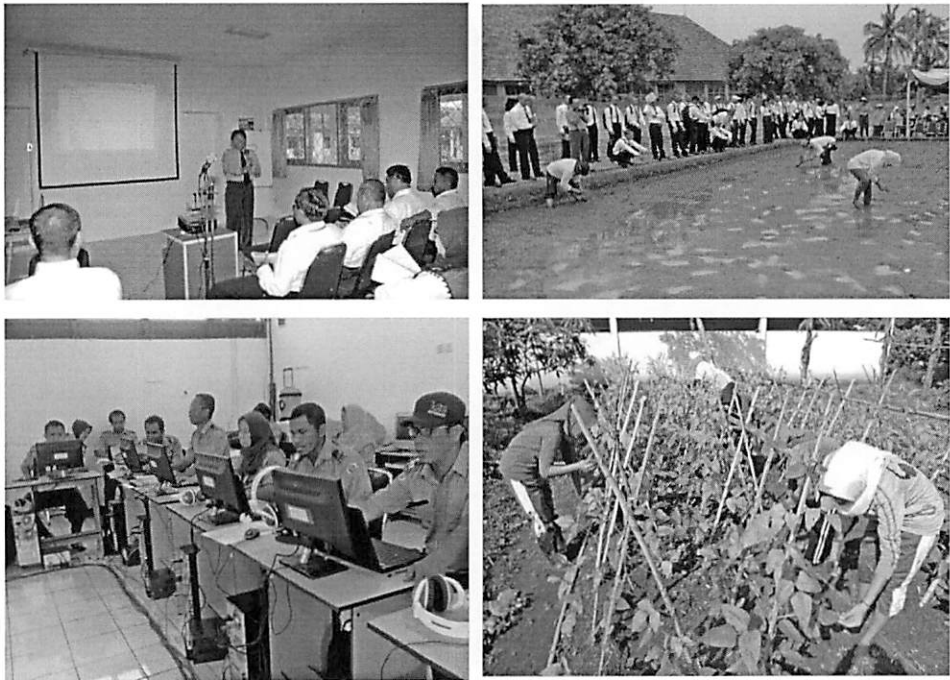
Tahun	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
2010	51.647	51.188	99,11
2011	36.000	51.117	142,16
2012	55.458	49.099	88,53
2013	49.282	49.677	100,80
2014	51.353	50.841	99,00

3. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian melalui Pendidikan Tinggi Pertanian

Berdasarkan Tabel 10, menunjukkan bahwa aparatur fungsional pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi pertanian yang meningkat kompetensinya sebanyak **98,26%** (target 2.651 orang aparatur fungsional pertanian, terealisasi 2.605 orang). Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi dicapai dengan penyelenggaraan pendidikan Diploma IV di STPP. Penyelenggaraan pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga fungsional rumpun ilmu hayati pertanian. Mekanisme dan metode penyelenggaraan mulai dari penerimaan mahasiswa baru, perencanaan perkuliahan dan pelaksanaan perkuliahan diatur melalui Peraturan Kepala Badan PPSDMP Nomor: 1421/Kpts/ SM.120/ 12/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran di STPP.

Peningkatan kompetensi tersebut terlaksana dengan didukung oleh beberapa hal yaitu:

- a. Penyelenggaraan pendidikan melalui kegiatan pengembangan spesifikasi STPP;
- b. Peningkatan kompetensi mahasiswa; pembinaan karakter mahasiswa;
- c. Pengembangan kewirausahaan mahasiswa; kerjasama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Proses pembelajaran berbasis elektronik.



Gambar 3. Aktivitas Proses Pembelajaran Aparatur Fungsional di STPP



Gambar 4. Wisuda Nasional STPP

Hal yang menghambat pencapaian kinerja tersebut adalah:

- Rendahnya minat PNS melanjutkan pendidikan ke STPP;
- Beberapa pemerintah daerah yang menjadi target tidak mengirimkan penyuluh PNS-nya untuk melanjutkan pendidikan di STPP;
- Ditiadakannya program alih jenjang di STPP;
- Terdapat mahasiswa yang mengundurkan diri, drop out atau meninggal dunia;
- Jumlah dosen sesuai dengan bidang keahlian penyuluhan pertanian masih kurang;
- Sarana-prasarana STPP yang masih minim.

Capaian kinerja meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian apabila dibandingkan dari tahun 2010 – 2014 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14.

Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian Melalui Pendidikan Tinggi Pertanian Tahun 2010 - 2014

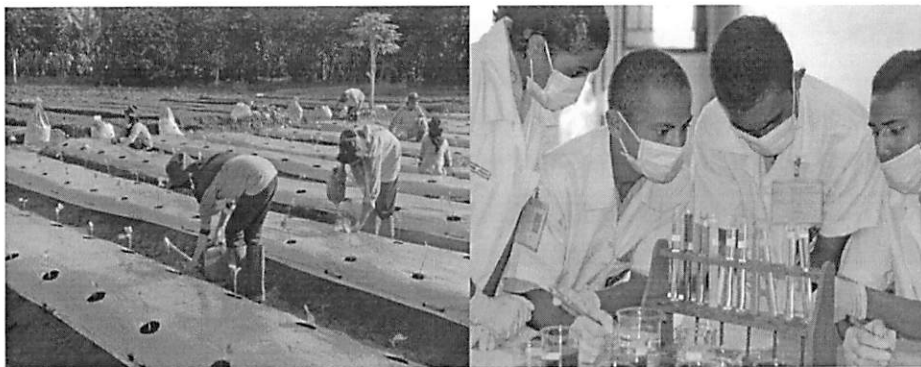
Tahun	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
2010	557	557	100,00
2011	350	434	124,00
2012	2.790	2.664	95,48
2013	2.676	3.042	113,68
2014	2.651	2.605	98,26

4. Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik Menengah Pertanian dan Calon Wirausahawan Muda

Berdasarkan Tabel 10, menunjukkan bahwa peserta didik menengah pertanian dan calon wirausahawan muda yang meningkat kompetensinya sebesar **102,33%** (target 18.077 orang peserta didik, terealisasi 18.499 orang). Peningkatan ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda didukung melalui penerimaan siswa baru; penjangkaran minat dan bakat siswa; pengadaan bahan ajar; bantuan bahan makan siswa; pengembangan unit produksi; pengembangan wirausaha siswa; kegiatan ekstrakurikuler serta bantuan praktek siswa SMK-PP.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda, didukung dengan:

- a. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan di UPT SMK-PP Banjarbaru, SMK-PP Sembawa, dan SMK-PP Kupang serta fasilitasi bantuan praktek siswa di SMK-PP;
- b. Diaturnya mekanisme penyaluran bantuan praktek siswa bagi SMK-Keputusan Kepala Badan PPSDMP Nomor: 25/Kpts/SM.100/J/02/2014, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Pendidikan Pertanian di SMK-PP;
- c. Perbaikan mekanisme penyaluran bantuan praktek siswa yaitu: (i) Berita acara antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Komite Sekolah; (ii) Penunjukan Pengelola Bansos di Sekolah untuk menjamin agar bansos sesuai dengan usulan proposal. Bansos praktek siswa sasaran adalah siswa SMK-PP melalui Komite Sekolah.



Gambar 5. Proses pembelajaran bagi siswa SMK-PP

Hal-hal yang menghambat dalam pencapaian kinerja tersebut adalah:

- a. Minimnya sarana-prasarana di SMK-PP;
- b. Keterbatasan tenaga pendukung yang terampil, seperti tenaga laboratorium.

Capaian kinerja meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian dan calon wirausahawan muda apabila dibandingkan dari tahun 2010 – 2014 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15.
Capaian Kinerja Peningkatan Ketersediaan Tenaga Teknis Menengah
Pertanian dan Calon Wirausahawan Muda Tahun 2010 – 2014

Tahun	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
2010	5000	5.000	100,00
2011	10.000	10.595	105,95
2012	16.248	14.277	87,87
2013	18.230	17.357	95,21
2014	18.077	18.499	102,33

Apabila dilihat pada Tabel 9, menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2014 realisasi lebih 100,00% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi alokasi anggaran yang direalokasikan untuk penambahan peserta didik yang akan ditingkatkan kompetensinya, khususnya bagi penerima bansos praktek siswa.

5. Meningkatnya Kemandirian (Kapasitas) Kelembagaan Petani

Berdasarkan Tabel 10, disajikan bahwa kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya sebesar **96,91 %** (target sebesar 20.386 unit dan terealisasi 19.756 unit). Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani didukung dengan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT Padi, jagung dan kedelai; pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di luar lokasi SL-PTT Padi, Jagung, Kedelai (lahan swadaya murni petani); pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi ternak sapi, tebu, bawang merah dan cabe; penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani/BUMP; penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani (Poktan dan Gapoktan); dan pemberian penghargaan bagi petani, gapoktan dan BUMP. Selain itu dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani didukung melalui, fasilitasi bagi klasifikasi P4S, pembinaan P4S dan pemberian penghargaan bagi P4S teladan.



Gambar 6. Kelembagaan petani Gapoktan dan P4S

Hal-hal yang mendukung keberhasilan dari kinerja adalah:

- a. Adanya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan petani melalui demfarm padi, jagung dan kedelai di lokasi swadaya murni petani;
- b. Penumbuhkembangan organisasi pertanian P4S yang direspon positif masyarakat.



Gambar 7. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi SL-PTT

Hal-hal yang menghambat kinerja adalah:

- a. Benih dan pupuk yang terlambat disalurkan, sehingga benih dan pupuk melalui swadaya petani;
- b. Kegiatan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT dan demfarm merupakan salah satu kegiatan yang terkena dampak dari penghematan (volume kegiatannya dikurangi);

- c. Di beberapa daerah tidak melaksanakan pendampingan pada SLPTT dikarenakan petani tidak bersedia menanam komoditas yang dianjurkan;
- d. Kegiatan demfarm di lapang yang tidak direalisasikan. Beberapa satker atau petani/kelompok tani yang tidak bersedia merealisasikan demfarm disebabkan, karena kekurangan SDM atau belum terbiasa oleh komoditas yang dianjurkan.

Capaian kinerja meningkatnya kemandirian kelembagaan petani tahun 2011 – 2014 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16.
Capaian Kinerja Peningkatan Kemandirian (Kapasitas)
Kelembagaan Petani Tahun 2011 – 2014

Tahun	Keterangan	Kelembagaan petani (penyuluhan)	Kelembagaan Petani P4S	Kelembagaan Petani (3+4)
1	2	3	4	5
2011	Target (unit)	32.000	170	32.170
	Realisasi (unit)	33.488	142	33.630
	%	<i>104,65</i>	<i>83,53</i>	<i>104,54</i>
2012	Target (unit)	51.534	229	51.763
	Realisasi (unit)	37.013	292	37.305
	%	<i>71.82</i>	<i>127.51</i>	<i>72,07</i>
2013	Target (unit)	11.016	250	11.266
	Realisasi (unit)	9.160	252	9.412
	%	<i>83.15</i>	<i>100.80</i>	<i>83.54</i>
2014	Target (unit)	20.087	299	20.386
	Realisasi (unit)	19.308	448	19.756
	%	<i>96,12</i>	<i>149,83</i>	<i>96,91</i>

6. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian

Berdasarkan Tabel 10, menunjukkan bahwa kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar **96,27%** (target 2.227 unit, terealisasi 2.144 unit).

Hal yang mendukung meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian adalah:

- a. Peningkatan kelembagaan penyuluhan melalui kegiatan revitalisasi peran Balai Penyuluhan (programa, database potensi wilayah, Latihan Kunjuang Supervisi dan kaji terap); koordinasi dan sinergisme kelembagaan penyuluhan dengan kelembagaan teknis dan kelembagaan litbang pada berbagai tingkatan pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan); peningkatan manajemen pimpinan dan pengelola BP3K; peningkatan peran Badan Koordinasi Nasional P3K dan Komisi Penyuluhan Pertanian; peningkatan peran Bakorluh dan Bapelluh dalam penguatan balai penyuluhan; penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan (Posluhdes);

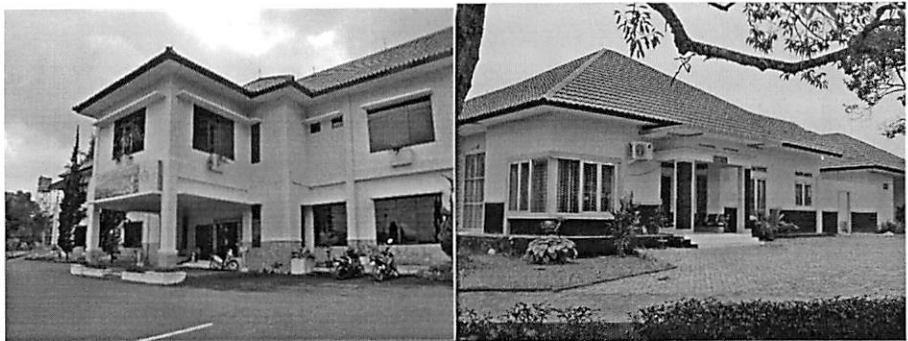


Gambar 8. Kunjungan Kepala Badan PPSDMP ke BP3K Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo



Gambar 9. Kegiatan Penyuluhan Pertanian di BP3K

- b. Peningkatan kelembagaan pelatihan pertanian melalui kegiatan peningkatan standarisasi pelayanan mutu dan lingkungan, serta akreditasi kelembagaan diklat UPT Pusat (10 unit) dan Daerah (18 UPT); serta peningkatan mutu dan jumlah sarana prasarana di UPT Pelatihan untuk penyelenggaraan diklat (screen house, asrama, sarana kelas berbasis Informasi Teknologi, Laboratorium, *e-library*, bengkel latih, instalasi usaha tani, beli/sewa tanah, Rumah Potong Hewan);



Gambar 10. Kelembagaan Pelatihan Pertanian (BBPP Lembang dan BPP Lampung)

- c. Peningkatan kelembagaan pendidikan tinggi melalui kegiatan penyempurnaan statuta, akreditasi institusi, akreditasi prodi, akreditasi jurnal, penyempurnaan pedoman akademik, penyusunan renstra, pedoman evaluasi hasil belajar, pedoman evaluasi hasil belajar;
- d. Peningkatan kelembagaan pendidikan menengah melalui kegiatan penerapan kurikulum 2013, reakreditasi prodi, kerjasama dengan dunia usaha dan industri, pengembangan Desa Mitra, Reakreditasi ISO 9001-2009



Gambar 11. Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Menengah Pertanian (STPP Magelang dan SMK-PP Baniarbaru)

Hal yang menghambat pencapaian kinerja kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian sebagai berikut:

- a. Kelembagaan penyuluhan
 - 1) Belum semua daerah membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2016;
 - 2) Belum semua BP3K berfungsi optimal sebagai pusat informasi.
- b. Kelembagaan pelatihan
 - 1) Jumlah, sebaran serta Kapasitas dan kompetensi penyelenggara kediklatan (Widyaiswara dan Tenaga Kediklatan) yang belum optimal;
 - 2) Belum optimalnya prasarana dan sarana kediklatan (asrama, kelas, laboratorium, sarana praktek);
 - 3) Belum optimalnya pemanfaatan diklat oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;

- 4) Belum optimalnya pelenggaraan kerjasama diklat dengan Pemerintah Daerah, Swasta, dan lain-lain.
- c. Kelembagaan pendidikan tinggi dan menengah
- 1) Kelembagaan pendidikan pertanian (STPP dan SMK-PP) belum sepenuhnya standar dan mutu layanan;
 - 2) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan STPP dan SMK-PP;
 - 3) Belum optimalnya kerjasama/koordinasi lintas sektor bidang pendidikan pertanian.

Capaian kinerja meningkatnya kemandirian kelembagaan petani tahun 2011 – 2014 disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17.
Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Bidang SDM Pertanian Tahun 2010 – 2014

Tahun	Keterangan	Penyuluhan	Pelatihan	Pendidikan Tinggi	Pendidikan Menengah	Total
1	2	3	4	5	6	7
2011	Target	494	10	6	3	513
	Realisasi	568	10	6	3	587
	%	114,97	100,00	100,00	100,00	114,42
2012	Target	494	10	6	9	519
	Realisasi	568	10	6	9	593
	%	107,49	100,00	100,00	100,00	114,25
2013	Target	1.402	18	186	384	1.990
	Realisasi	1.402	18	186	291	1.897
	%	100,00	100,00	100,00	75,78	95,33
2014	Target	1.577	25	183	442	2.227
	Realisasi	1.577	25	177	365	2.144
	%	100,00	100,00	96,72	82,56	96,27

Selain capaian kinerja yang terdapat dalam Penetapan Kinerja, beberapa capaian kinerja yang lain adalah:

- a. Ketenagaan pelatihan pertanian yang terfasilitasi sebesar 101,72% (target 2.438 orang, realisasi 2.480 orang);
- b. Ketenagaan pendidikan tinggi pertanian yang terfasilitasi sebesar 120,24% (target 736 orang; realisasi 885 orang);

- c. Ketenagaan pendidikan menengah pertanian yang terfasilitasi sebesar 117,20% (target 744 orang; realisasi 872 orang);
- d. Terlaksananya standarisasi profesi pertanian sebesar 66,67 %. (target 3 dokumen SKKNI, realisasi 2 dokumen SKKNI). Dokumen tersebut adalah SKKNI Pengembangan Bibit Ternak dan Juru Sembelih Halal;
- e. Terlaksananya fasilitasi sertifikasi profesi bagi sebesar 96,80% (realisasi 484 orang penyuluh pertanian, target 500 orang penyuluh pertanian);
- f. Terfasilitasinya aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan formal pasca sarjana (S2/S3) sebesar 99,57% (target 230 orang, terealisasi 229 orang) ;
- g. Terfasilitasinya 100% desa terfasilitasi (target 150 desa, realisasi 150 desa) dalam program *Rural Empowerment and Agricultural Development (READ) Programme in Central Sulawesi* yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*.

Beberapa permasalahan dan persoalan yang masih harus diselesaikan dalam pencapaian kinerja dilihat dari aspek-aspek yaitu sebagai berikut:

1. Kelembagaan Pemerintah

- a. Belum semua Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan membentuk Kelembagaan Penyuluhan sesuai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan;
- b. Belum optimalnya peran Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan;
- c. Belum optimalnya dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
- d. Belum optimalnya prasarana dan sarana kediklatan (asrama, kelas, laboratorium, sarana praktek);
- e. Kelembagaan pendidikan pertanian (STPP dan SMK-PP) belum sepenuhnya standar dan mutu layanan;
- f. Minimnya sarana-prasarana UPT Pendidikan (STPP dan SMK-PP).

2. SDM dan Kelembagaan Petani

- a. Berkurangnya jumlah penyuluh, menurunnya kualitas penyuluh, minimnya formasi CPNS bagi penyuluh, mayoritas usia penyuluh PNS di atas 50 tahun dan minimnya pelatihan bagi penyuluh;
- b. Lemahnya kapasitas petani dan kelembagaan petani;
- c. Belum optimalnya transfer teknologi dari sumber informasi ke petani;
- d. Jumlah, sebaran serta Kapasitas dan kompetensi penyelenggara kediklatan (Widyaiswara & Tenaga Kediklatan) yang belum optimal;
- e. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui P4S.
- f. Rendahnya minat PNS melanjutkan pendidikan ke STPP;
- g. Rendahnya kesadaran masyarakat pertanian tentang manfaat dan pentingnya sertifikasi profesi.

3. Koordinasi, Teknis, Administrasi dan Manajemen

- a. Belum optimalnya pemanfaatan diklat oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan kerjasama diklat dengan Pemerintah Daerah, Swasta, dan lain-lain;
- c. Eselon I lingkup Kementerian Pertanian belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan STPP dan SMK-PP;
- d. Belum optimalnya kerjasama/koordinasi lintas sektor bidang pendidikan pertanian.

B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai DIPA Induk Nomor : SP DIPA-018.10-0/AG/2014 Nomor DS : 6690-9826-2134-9479 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp 1.149.818.700.000,00;
2. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, anggaran Badan PPSDMP menjadi Rp 1.098.836.025.000,00 (Revisi Bulan Juli 2014). Pagu tersebut dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014;

3. Anggaran BPPSDMP Tahun 2014 setelah mendapat alokasi APBN-P terkait kegiatan READ menjadi Rp 1.114.779.025.000,00 (Revisi bulan Juli 2014);
4. Anggaran BPPSDMP direvisi setelah adanya penambahan PNPB BBPP Batu, sehingga menjadi **Rp 1.114.979.737.000,00** (Revisi Bulan November 2014).

Alokasi anggaran tahun 2014 dalam rangka membiayai satker di tingkat pusat dalam mendukung kinerja 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP dan Kegiatan READ. Selain itu anggaran diperuntukan untuk 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 5 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).

Realisasi serapan anggaran BPPSDMP Tahun 2014, secara menyeluruh mencapai **95,52%** yaitu sebesar Rp1.065.052.207.670,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp1.114.979.737.000,00. Perkembangan realisasi anggaran tahun 2010 s.d. 2014 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18.
Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran Badan PPSDMP
Tahun 2010-2014

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2010	1.247.591.158.000,00	1.090.519.431.208,00	87,41
2011	1.320.466.624.000,00	1.197.339.473.532,00	90,68
2012	1.441.951.871.000,00	1.336.947.447.259,00	92,72
2013	1.341.652.283.000,00	1.232.558.531.670,00	91,87
2014	1.114.979.737.000,00	1.065.052.207.670,00	95,52

BAB IV

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDMP merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mendorong penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi Badan PPSDMP selama tahun 2014 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2014.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas fungsi yang diemban oleh Badan PPSDMP selama tahun 2014. Pada tahun 2014 sasaran strategis Badan PPSDMP terangkum kedalam enam sasaran strategis yang dipayungi oleh Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.

Secara umum rata-rata capaian kinerja sebesar **101,14%**. Capaian kinerja terendah diperoleh dari meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian sebesar **96,27%**, sedangkan capaian kinerja tertinggi diperoleh dari meningkatnya kompetensi aparatur pertanian sebesar **108,06%**. Realisasi serapan anggaran BPPSDMP Tahun 2014 pada tahun 2014, secara menyeluruh mencapai **95,52%**.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan PPSDMP tidak terlepas oleh pelaksanaan kinerja pada masing-masing unit Eselon II Lingkup Badan PPSDMP, UPT, Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dukungan tersebut berupa program/kegiatan yang mempengaruhi sasaran dan pencapaian target pada tahun 2014. Selain dari pihak internal, maka secara keseluruhan keberhasilan kinerja Badan PPSDMP didukung oleh pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan Petani. Dalam pencapaian kinerja Badan PPSDMP masih mendapatkan permasalahan/kendala. Permasalahan/kendala tersebut harus diantisipasi agar tidak terulang lagi di masa

mendatang. Beberapa upaya tindak lanjut yang seharusnya dilakukan Badan PPSDMP untuk meningkatkan kinerjanya sebagai berikut:

1. Meningkatkan advokasi dalam pembentukan kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Memperkuat BP3K dengan menyediakan dana operasionalisasi sebagai simpul koordinasi program dan kegiatan lintas Eselon I lingkup Kementerian Pertanian juga lintas Kementerian dan sebagai pusat data (cyber extension dan sms center);
3. Memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penguatan kelengkapan fasilitas BP3K.
4. Mengoptimalkan dan meningkatkan sarana-prasarana penyuluhan, kediklatan, dan pendidikan melalui dukungan kerjasama;
5. Mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh swadaya melalui rekrutmen, fasilitasi dan pelatihan metodologi penyuluhan;
6. Mengoptimalkan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani melalui kerjasama pelaksanaan pelatihan dengan SKPD daerah dan pemberdayaan P4S (Pusat Pelatihan Pengembangan Perdesaan Swadaya) sebagai tempat pelatihan bagi petani, serta penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani
7. Meningkatkan peran diseminasi teknologi dengan meningkatkan pertemuan gelar teknologi di tingkat petani;
8. Mengidentifikasi kembali kebutuhan widyaiswara per UPT dan melalui redistribusi widyaiwara dan perekrutan widyaiwara sesuai dengan analisa kebutuhan;
9. Pemberdayaan P4S dengan menumbuhkembangkan P4S, meningkatkan pelatihan bagi pengelola P4S, dan mengoptimalkan pendampingan P4S;
10. Meningkatkan promosi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya sertifikasi profesi khusus dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.
11. Meningkatkan kerjasama dengan Eselon I lingkup Kementerian dan pihak swasta dengan lebih mengoptimalkan promosi, komunikasi dan koordinasi dalam mengidentifikasi kebutuhan latihan

12. Meningkatkan sosialisasi kegiatan pendidikan di STPP di wilayah penerimaan mahasiswa STPP baik di pemerintah daerah, eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya;
13. Meningkatkan peran STPP dalam mendukung program pembangunan pertanian.

Kiranya Laporan Kinerja ini dapat dapat memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan terkait untuk dapat digunakan sebagai penetapan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian ke depan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

**PENETAPAN KINERJA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2014**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

PENETAPAN KINERJA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2014

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Winny Dian Wibawa
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Suswono
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2014

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Suswono

Winny Dian Wibawa

PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (Inpres No.4 Tahun 2014)
1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pelatihan	1. Kompetensi aparatur di sektor pertanian	9.599 orang ✓
	2. Kompetensi non aparatur di sektor pertanian	3.791 orang ✓
2. Meningkatnya kinerja* ketenagaan penyuluhan pertanian	Kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian	51.353 orang ✓
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian	Kompetensi aparatur fungsional pertanian	2.651 orang
4. Meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian dan calon wirausahawan muda	(Kompetensi) Tenaga teknis menengah dan calon wirausaha muda pertanian	18.077 orang
5. Meningkatnya kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani	Kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani	20.386 unit
6. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian	Kualitas (kapasitas) kelembagaan pemerintah di bidang SDM Pertanian	2.227 unit

Jumlah Anggaran :

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
 Rp.1.098.836.025.000,-

Jakarta,

2014

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Suswono

Winny Dian Wibawa

LAMPIRAN 2.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2014**

LAMPIRAN 3.

**ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN TAHUN 2014**

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
BERDASARKAN MANUAL LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
SAMPAI DENGAN 26 Januari 2015

NO	KODE	S A T K E R	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			BANTUAN SOSIAL			JUMLAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
VERTIKAL																	
	412069	BPPSNP JAKARTA	22.078.095.000	19.672.725.617	89,11	108.197.876.000	100.445.963.709	92,84	1.387.187.000	1.345.634.960	97,00	9.167.352.000	8.973.712.150	97,89	140.830.510.000	130.438.036.436	92,62
	JUMLAH KP	A. PUSAT	22.078.095.000	19.672.725.617	89,11	108.197.876.000	100.445.963.709	92,84	1.387.187.000	1.345.634.960	97,00	9.167.352.000	8.973.712.150	97,89	140.830.510.000	130.438.036.436	92,62
	237200	PPMPP Ciawi, Jabar	11.645.260.000	10.885.858.898	93,48	11.907.546.000	11.786.654.731	98,98	1.872.394.000	1.868.669.500	99,80	-	-	-	25.425.200.000	24.541.180.129	96,52
2	412075	BPPM Cinagara - Bogor, Jabar	4.609.917.000	4.337.787.302	94,10	9.860.090.000	9.410.013.534	95,44	1.332.175.000	1.158.813.500	86,99	-	-	-	15.802.182.000	14.906.614.336	94,33
3	239701	BPPP Lembang, Jabar	7.086.031.000	6.972.250.561	98,39	10.017.296.000	9.721.052.127	97,04	384.424.000	375.659.764	97,72	-	-	-	17.487.751.000	17.068.962.452	97,61
4	239654	BPPP Kesindan, Malang - Jatim	5.617.521.000	5.387.294.613	95,90	10.146.323.000	9.808.859.283	96,68	1.448.244.000	1.441.293.250	99,52	-	-	-	17.212.088.000	16.637.547.146	96,66
5	239675	BPPP Batu, Malang - Jatim	5.408.711.000	5.258.775.038	97,23	8.238.479.000	8.162.043.175	99,19	4.486.341.000	4.458.232.000	100,00	-	-	-	18.123.551.000	17.907.050.213	98,81
6	239661	BPPP Batang Saluku, Sulsel	5.337.138.000	4.989.034.747	93,48	12.387.066.000	11.842.680.920	95,76	895.775.000	925.969.000	103,26	-	-	-	18.000.979.000	17.757.684.667	98,47
	239640	BPPP Binuang, Kalsel	3.674.444.000	3.486.141.265	94,88	9.776.973.000	8.962.682.071	91,67	884.021.000	876.076.500	99,10	-	-	-	14.335.438.000	13.334.899.836	92,95
8	412081	BPPP Kupang, NTT	3.886.208.000	3.896.526.123	100,27	9.624.118.000	9.569.292.713	99,43	785.692.000	783.777.000	99,76	-	-	-	14.296.018.000	14.249.595.836	99,68
9	394771	BPP Jambli	4.237.814.000	4.072.177.711	96,09	9.912.427.000	9.583.164.980	96,68	648.856.000	647.449.000	99,78	-	-	-	14.799.097.000	14.302.791.691	96,65
10	120040	BPP Lampung	4.362.684.000	3.899.900.300	89,39	7.401.390.000	6.862.217.230	92,72	1.883.693.000	1.868.323.200	99,18	-	-	-	13.647.767.000	12.630.340.730	92,55
	B. UPT PELATIHAN		55.865.748.000	53.185.743.558	95,20	99.241.708.000	95.708.760.764	96,44	14.472.615.000	14.432.162.714	98,70	-	-	-	160.730.071.000	160.326.667.036	99,73
	237160	STPP Bogor, Jabar	9.754.830.000	9.603.969.831	98,45	10.122.848.000	10.051.448.906	99,29	100.800.000	100.749.000	99,95	-	-	-	19.978.478.000	19.756.167.737	98,89
	412090	STPP Magelang Iur, Peternakan, Jateng	6.913.889.000	6.377.984.083	92,25	5.992.479.000	5.202.896.803	86,82	25.000.000	20.359.600	81,44	-	-	-	12.931.368.000	11.601.240.486	89,71
13	237437	STPP Jurusan Penyulh Pert. Yogyakarta	6.655.538.000	6.530.546.736	98,12	6.210.105.000	5.677.680.106	91,43	-	-	-	-	-	-	12.865.643.000	12.708.226.842	94,89
14	237490	STPP Malang, Jatim	9.786.511.000	10.114.007.925	103,35	10.742.150.000	10.736.098.258	99,94	1.636.515.000	1.635.645.000	99,95	-	-	-	22.165.176.000	22.485.751.183	101,45
15	237636	STPP Medan, Sumut	4.548.124.000	4.304.337.238	94,64	10.040.088.000	9.042.233.275	89,98	977.490.000	973.964.000	99,64	-	-	-	15.574.702.000	14.320.534.513	91,95
16	239125	STPP Manokwari, Papua Barat	4.291.566.000	3.946.452.452	91,96	8.768.662.000	8.328.613.058	94,98	-	-	-	-	-	-	13.060.228.000	12.275.065.510	93,99
17	238069	STPP Gowa, Sulsel	6.103.660.000	5.951.893.926	97,51	10.300.955.000	10.235.806.294	99,37	-	-	-	-	-	-	16.404.615.000	16.187.700.220	98,68
	UPT PENDIDIKAN		48.054.118.000	46.123.192.191	97,45	62.186.287.000	59.274.776.700	95,32	2.739.805.000	2.710.217.600	98,67	-	-	-	112.980.210.000	108.834.086.491	96,33
18	237814	SPNN Sembawa, Sumel	4.715.821.000	4.437.792.164	94,10	4.870.170.000	4.380.739.108	89,94	1.241.187.000	1.229.337.000	99,05	-	-	-	10.827.178.000	10.027.868.272	92,62
19	237924	SPNN Banjarbaru, Kalsel	3.364.187.000	3.094.982.686	91,98	7.821.066.000	7.021.644.009	89,78	677.210.000	642.250.000	94,77	-	-	-	11.863.563.000	10.758.076.695	90,69
20	412101	SPNN Kupang, NTT	3.528.270.000	3.333.279.646	94,47	6.000.234.000	5.700.604.150	95,01	568.030.000	297.780.000	52,42	-	-	-	10.096.484.000	9.331.663.796	92,42
	UPT PENDIDIKAN B		11.088.828.000	10.846.054.486	97,40	18.691.470.000	17.082.987.267	91,39	2.486.537.000	2.169.367.000	87,23	-	-	-	32.787.225.000	30.118.408.753	91,86
	UPT PENDIDIKAN (B+C)		59.252.946.000	57.669.246.677	97,34	80.877.750.000	76.357.763.967	94,42	5.226.337.000	4.889.067.000	93,75	-	-	-	15.273.635.000	13.933.095.254	91,54
JUMLAH UPT PUSAT (B+C)																	
			51.552.624.000	50.480.790.245	97,16	110.480.790.000	107.066.571.721	96,87	10.409.547.000	9.571.217.114	91,99	-	-	-	315.497.506.000	302.279.625.290	95,81
DEKONTRASI																	
1	029175	Bakorluh Pertanian, Perlakuan dan Kehutanan Prov. Jabar	-	-	-	44.921.223.000	44.532.334.750	99,13	-	-	-	-	-	-	44.921.223.000	44.532.334.750	99,13
	039418	Sekretariat Bakorluh Prov. Jawa Tengah	-	-	-	61.818.925.000	60.232.658.700	97,75	-	-	-	-	-	-	61.818.925.000	60.232.658.700	97,75
3	040602	Badan Kestabanan Pangan dan Penyuluhan Prov. DIY	-	-	-	7.223.817.000	7.015.344.850	97,11	-	-	-	-	-	-	7.223.817.000	7.015.344.850	97,11
4	050040	Badan Kestabanan Pangan Provinsi Jawa Timur	-	-	-	71.933.274.000	71.241.860.900	99,04	-	-	-	-	-	-	71.933.274.000	71.241.860.900	99,04
5	060079	Badan Kestabanan Pangan dan Penyuluhan Prov. Aceh	-	-	-	38.765.985.000	37.389.354.200	96,45	-	-	-	-	-	-	38.765.985.000	37.389.354.200	96,45
6	079324	Bakorluh Pertanian, Perlakuan dan Kehutanan Prov. Sumut	-	-	-	41.988.871.000	40.799.975.700	97,17	-	-	-	-	-	-	41.988.871.000	40.799.975.700	97,17
	089012	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Sumbar	-	-	-	21.975.341.000	20.665.373.000	94,11	-	-	-	-	-	-	21.975.341.000	20.665.373.000	94,11

NO	KODE	S A T K E R	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			BANTUAN SOSIAL			JUMLAH		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
8	090436	Badan Koordinasi Penyaluran Prov. Riau	-	-	-	12.069.413.000	11.586.019.450	95,99	-	-	-	-	-	-	12.069.413.000	11.586.019.450	95,99
9	109069	Sekretariat Bakorwil Prov. Jambi	-	-	-	13.042.761.000	12.024.426.699	92,14	-	-	-	-	-	-	13.042.761.000	12.024.426.699	92,14
10	110005	Bakorwil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Sumut	-	-	-	22.668.470.000	21.547.697.157	95,06	-	-	-	-	-	-	22.668.470.000	21.547.697.157	95,06
11	129219	Sekr. Bakorwil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Prov. Lampung	-	-	-	22.087.461.000	21.371.632.560	96,76	-	-	-	-	-	-	22.087.461.000	21.371.632.560	96,76
12	139073	Badan Kehutanan Pangan dan Penyaluran Prov. Kalimantan	-	-	-	16.161.744.000	15.213.909.500	94,14	-	-	-	-	-	-	16.161.744.000	15.213.909.500	94,14
13	149004	Bakorwil Kehutanan Pangan dan Koordinasi Penyaluran Prov. Sulawesi	-	-	-	10.939.123.000	10.298.362.100	94,14	-	-	-	-	-	-	10.939.123.000	10.298.362.100	94,14
14	159266	Sekretariat Bakorwil Prov. Kalsel	-	-	-	17.970.489.000	15.403.886.575	85,72	-	-	-	-	-	-	17.970.489.000	15.403.886.575	85,72
15	169065	Badan Kehutanan Pangan dan Penyaluran Prov. Kalimantan	-	-	-	11.122.314.000	9.787.242.850	88,00	-	-	-	-	-	-	11.122.314.000	9.787.242.850	88,00
16	175153	Sekr. Bakorwil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Sulut	-	-	-	13.373.030.000	13.038.944.000	97,50	-	-	-	-	-	-	13.373.030.000	13.038.944.000	97,50
17	180019	Dinas Pertanian Daerah Prov. Sulteng	-	-	-	5.214.341.000	4.950.081.100	94,93	-	-	-	-	-	-	5.214.341.000	4.950.081.100	94,93
18	189216	Bakorwil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Sulawesi	-	-	-	14.533.506.000	13.880.500.400	95,51	-	-	-	-	-	-	14.533.506.000	13.880.500.400	95,51
19	199375	Badan Koordinasi Penyaluran Prov. Sulsel	-	-	-	35.389.989.000	34.039.223.460	96,44	-	-	-	-	-	-	35.389.989.000	34.039.223.460	96,44
20	209183	Bakorwil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Sulteng	-	-	-	16.297.505.000	14.990.811.100	91,98	-	-	-	-	-	-	16.297.505.000	14.990.811.100	91,98
21	219176	Bakorwil Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku	-	-	-	9.017.807.000	8.978.927.000	99,57	-	-	-	-	-	-	9.017.807.000	8.978.927.000	99,57
22	229030	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Bali	-	-	-	8.678.128.000	8.052.835.650	92,79	-	-	-	-	-	-	8.678.128.000	8.052.835.650	92,79
23	239224	Sekr. Bakorwil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. NTB	-	-	-	21.259.974.000	20.450.031.425	96,19	-	-	-	-	-	-	21.259.974.000	20.450.031.425	96,19
24	249095	Badan Kehutanan Pangan dan Penyaluran Prov. NTT	-	-	-	30.284.747.000	28.851.960.498	95,27	-	-	-	-	-	-	30.284.747.000	28.851.960.498	95,27
25	259021	Badan Kehutanan Pangan dan Koordinasi Penyaluran Prov. Papua	-	-	-	13.815.458.000	11.951.684.545	86,51	-	-	-	-	-	-	13.815.458.000	11.951.684.545	86,51
26	269190	Sekretariat Bakorwil Prov. Bengkulu	-	-	-	11.794.817.000	11.794.817.000	99,59	-	-	-	-	-	-	11.794.817.000	11.794.817.000	99,59
27	289169	Sekr. Bakorwil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Maluku Utara	-	-	-	7.617.636.000	7.086.216.000	93,02	-	-	-	-	-	-	7.617.636.000	7.086.216.000	93,02
28	290077	Badan Kehutanan Pangan dan Penyaluran Prov. Sulawesi	-	-	-	11.611.161.000	10.992.745.800	94,67	-	-	-	-	-	-	11.611.161.000	10.992.745.800	94,67
29	305143	Sekr. Bakorwil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Babel	-	-	-	3.646.946.000	3.056.076.520	83,80	-	-	-	-	-	-	3.646.946.000	3.056.076.520	83,80
30	319141	Sekr. Bakorwil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Gorontalo	-	-	-	8.259.546.000	8.167.465.000	98,89	-	-	-	-	-	-	8.259.546.000	8.167.465.000	98,89
31	329032	Badan Kehutanan Pangan Prov. Kepulauan Riau	-	-	-	650.856.000	548.514.800	84,28	-	-	-	-	-	-	650.856.000	548.514.800	84,28
32	339059	Sekretariat Bakorwil dan Kehutanan Pangan Prov. Papua Barat	-	-	-	5.567.780.000	5.521.140.000	99,16	-	-	-	-	-	-	5.567.780.000	5.521.140.000	99,16
33	345105	Sekr. Bakorwil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Sulbar	-	-	-	5.943.681.000	5.915.544.525	99,53	-	-	-	-	-	-	5.943.681.000	5.915.544.525	99,53
34	019071	Dinas Kehutanan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	-	-	-	1.742.526.000	1.160.975.900	66,63	-	-	-	-	-	-	1.742.526.000	1.160.975.900	66,63
Jumlah			638.743.707.000	612.738.573.854	95,93	638.743.707.000	612.738.573.854	95,93	-	-	-	-	-	-	638.743.707.000	612.738.573.854	95,93
TOTAL			137.606.289.000	130.553.715.862	94,87	940.575.912.000	898.504.941.864	95,53	21.218.534.000	20.477.882.274	97,37	15.500.402.000	15.314.267.670	98,43	1.665.052.207.670	1.605.052.207.670	95,52

Note :

Kabag Keuangan dan Perencanaan

Ir. Widyati, MSc
NIP. 19550313 198303 2 001